

## ABSTRAK

Muhammadiyah sangat dilematis didalam memberikan sikap jika dibenturkan dalam persoalan-persoalan politik, terutama disaat momentum-momentum pemilihan umum. Hal itu dikarenakan Muhammadiyah memiliki pedoman khittah yang telah disepakati bersama-sama, bahwa Muhammadiyah tidak boleh terlalu masuk didalam ruang-ruang politik, apalagi sampai berafiliasi dengan partai politik. Namun pedoman khittah tersebut nyatanya kurang sesuai dengan kondisi saat dilapangan, Muhammadiyah yang selama ini dipandang sebagai organisasi Islam yang netral, akhirnya ikut terlibat aktif di dalam momentum-momentum politik seperti Pilkada.

Penelitian ini bertujuan untuk menguji netralitas politik Muhammadiyah di Pilkada Kota Yogyakarta 2017 dan mengetahui aktivitas-aktivitas politik Muhammadiyah selama proses Pilkada Kota Yogyakarta berlangsung, setelah itu di ukur dengan beberapa indikator mengenai netralitas politik untuk menguji apakah Muhammadiyah netral atau tidak, dan untuk mengetahui bentuk netralitas yang diterapkan Muhammadiyah di Pilkada Kota Yogyakarta 2017.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dan menggunakan jenis pendekatan studi kasus. Studi kasusnya yaitu PDM Kota Yogyakarta di Pilkada Kota Yogyakarta 2017. Sumber-sumber data penelitian ini berasal dari wawancara dan dokumentasi. Responden yang di wawancarai adalah dari Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Yogyakarta, dan beberapa keorganisasian Muhammadiyah yang terletak di Kota Yogyakarta, serta responden lain yang terlibat didalam penelitian ini.

Dari hasil penelitian ini telah diperoleh gambaran mengenai bentuk netralitas politik PDM Kota Yogyakarta di Pilkada Kota Yogyakarta, bahwa bentuk netralitas yang diwujudkan PDM adalah berupa sikap tentang keberpihakan kepada suatu nilai, dan nilai tersebut harus diperjuangkan sesuai dengan konteks yang terjadi yaitu Pilkada Kota Yogyakarta 2017. PDM secara formal organisasi bersikap netral di Pilkada Kota Yogyakarta, akan tetapi dengan bentuk netralitas yang diterapkan PDM, maka netralitas tersebut dikategorikan sebagai netralitas semu. Kemudian, terdapat tiga aspek yang dapat mengukur netralitas politik Muhammadiyah. *Pertama*, sikap secara tidak aktif mendukung salah kandidat. *Kedua*, tidak menjadi tim sukses salah satu calon. *Ketiga*, tidak memiliki kepentingan politik.

Dari ketiga aspek tersebut, penulis menyimpulkan berdasarkan data-data di lapangan bahwa PDM Kota Yogyakarta tidak netral, karena tidak memenuhi indikator ketiga aspek tersebut. Ketidaknetralan PDM disini bukan berdasarkan bahwa PDM berafiliasi dengan partai politik, atau berperilaku seperti partai politik untuk memenangkan calon di Pilkada Kota Yogyakarta 2017. Akan tetapi, karena keberpihakan PDM mendukung salah satu calon di Pilkada Kota Yogyakarta 2017.

**Kata Kunci :** Muhammadiyah, Netralitas Politik, Pilkada Kota Yogyakarta